



**PROFESIONALISME KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI KARAKTERISTIK
FIQH SIYASAH DI KECAMATAN SIABU
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**Anugrah Al Basyir Lubis
NIM. 15 103 00050**

PROGRAM STUDI BUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



Scanned with
CamScanner



**PROFESIONALISME KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI KARAKTERISTIK
FIQH SIYASAH DI KECAMATAN SIABU
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**Anugrah Al Basyir Lubis
NIM. 15 103 00050**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





**PROFESIONALISME KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI KARAKTERISTIK
FIQH SIYASAH DI KECAMATAN SIABU
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ANUGRAH AL BASYIR LUBIS
NIM. 15 103 00050**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004**

PEMBIMBING II

**Hasiyah, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Anugrah Al Bsyir Lubis**

Lampiran: 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Anugrah Al Basyir Lubis yang berjudul **“Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Karakteristik Kepemimpinan Fiqh Siyasah Di Kecamatan Siabu Mandailing Natal”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, dalam waktu yang berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatian dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Al Basyir Lubis
Nim : 15 103 00050
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Karakteristik Kepemimpinan Fiqh Siyarah Di Kecamatan Siabu Mandailing Natal**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan *plagiasi* sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2019
Pembuat Pernyataan,



Anugrah Al Basyir Lubis
Nim. 15 103 00050





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Al Basyir Lubis
Nim : 15 103 00050
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang Berjudul **“Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Karakteristik Kepemimpinan Fiqh Siyasah Di Kecamatan Siabu Mandailing Natal”**. Serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mangalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, November 2019
Saya yang menyatakan



Anugrah Al Basyir Lubis
Nim. 15 103 00050





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Anugrah Al Basyir Lubis
NIM : 15 103 00050
JUDUL SKRIPSI : Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Karakteristik Fiqh Siyash Di Kecamatan Siabu Mandailing Natal

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 0004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 0004

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001

Ahmatuzjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.Ag
NIP.19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 14 November 2019
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : 88,5 (A-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,01
Predikat : *Tidak Lulus/Cukup/Sangat Memuaskan/Pujian*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 1821 /In.14/D/PP.00.9/11/2019

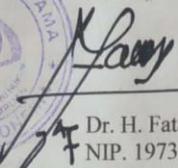
Judul Skripsi : Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari
Karakteristik Fiqh Siyash Di Kecamatan Siabu Mandailing
Natal

Ditulis Oleh : Anugrah Al Basyir Lubis
NIM : 15 103 00050

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 18 November 2019
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



ABSTRAK

NAMA : ANUGRAH AL BASYIR LUBIS
NIM : 1510300050
**JUDUL : PROFESIONALISME KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI KARAKTERISTIK FIQIH
SIYASAH DI KECAMATAN SIABU MANDAILING NATAL**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan professional pemimpin kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana pemimpin masyarakat yang adil dan makmur dalam mensejahterakan masyarakat menurut konsep fiqih siyasah, apa hambatan yang menjadi penyebab tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Untuk mengetahui bagaimana tindakan professional pemimpin kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Untuk mengetahui bagaimana pemimpin masyarakat yang adil dan makmur dalam mensejahterakan masyarakat menurut konsep fiqih siyasah, untuk mengetahui apa hambatan yang menjadi penyebab tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siabu, Mandailing Natal.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif, sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa Program kerja Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu memberikan sarana dan prasarana dalam bidang usaha masyarakat, fokus pada bidang pertanian seperti memberikan perlengkapan pertanian, memberi akses jalan menuju sawah-sawah masyarakat. Namun sarana prasarana bidang usaha masyarakat belum sepenuhnya di dapatkan masyarakat. Hambatan yang terdapat dalam tiap-tiap desa yaitu bidang keamanan, bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan, dan bidang pembangunan. Pimpinan kepala desa dalam menyejahterakan masyarakat yaitu mengendalikan dan menjaga keamanan desa, mengajak masyarakat bergotong royong, memberi kemudahan masyarakat untuk mengelola sawah agar lebih baik. Namun dalam hal pembangunan kepala desa lebih mengutamakan kerabat dekat dari pada warga yang membutuhkan pekerjaan pembangunan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan dalam kepada Rasulullah Muhammad yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman bagi ummat manusia. Skripsi ini berjudul "**Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Karakteristik Kepemimpinan Fiqih Siyash di Kecamatan Siabu Mandailing Natal**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan tentang masalah yang dibahas dan penulis juga menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan moril dan materil dari semua pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, tetapi berkat kerja keras dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini serta akan berakhirnya perkuliahan penulis, maka ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar Nasution, MA selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dra. Asna MA, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Drs. Muhammad Arsyad M.Ag, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe M.H, selaku Ka Prodi Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Muhammad Arsyad M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiyah M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, semangat dan pengarahan kepada penulis mulai dari awal bimbingan sampai penyelesaian penulisan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. Serta seluruh civitas akademik FASIH IAIN Padangsidempuan.
6. Kepada Ayahanda Pangeran Rao Lubis dan Ibunda Siti Asyura yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan motivasi saat peneliti merasa lelah menuntut ilmu. Ayahanda dan Ibunda yang selalu siap memenuhi segala kebutuhan peneliti mulai dari SD sampai saat ini, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah peneliti terutama saat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sangat berterimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang bersedia banting tulang

menahan panas terik dan hujan demi menyekolahkan peneliti sampai memperoleh gelar Sarjana. Serta yang selalu memberi dukungan dan do'a mulai dari pendidikan tingkat Dasar sampai menyelesaikan S1 di IAIN Padangsidempuan.

7. Kepada kakak penulis Khadijah Saputri, Ahmad Faisal Tanjung dan adik peneliti Sophia Ulva Lubis, Sultan Naufal Lubis, dan Ismail Marzuki Lubis yang tidak pernah lupa memberikan dukungan dan do'a.
8. Kepada sahabat dan teman dekat penulis, Rahma Fitri Asih Purba, Fahrur Rozy, Rahmad Siregar dan teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak, guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, disini penulis ucapkan terimakasih, semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Padangsidempuan,

2019

Anugrah Al Basyir Lubis
Nim. 15 103 000 50

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi 'Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
--- ِ ---	Kasrah	i	i
--- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وـ َ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: ظِلَّةٌ → *Talhah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعْمَ → *na'ima*

6. Penulisan Huruf Alif Lam

- a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

- b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

- c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Istilah	6
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II Tinjauan Pustaka.....	11
A. Profesionalisme.....	11
1. Pengertian Profesionalisme	11
2. Ciri-ciri Profesionalisme	11
3. Syarat-syarat Profesionalisme.....	13
4. Profesionalisme Pemerintah Menurut Fiqh Siyasah	14
B. Pemerintahan Desa	14
1. Kepala Desa	16
2. Syarat-syarat Menjadi Kepala Desa	17
3. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	18
4. Kewenangan dan Pemerintahan Desa	18
C. Masyarakat	19
D. Pemimpin dalam Pandangan Islam.....	22
1. Pengertian Pemimpin	22
2. Karakter Pemimpin	23
3. Tipe-tipe Pemimpin.....	26
E. Kepemimpinan pada Masa Nabi Muhammad.....	27
1. Kualitas Kepemimpinan.....	30
2. Langkah-langkah Memperkuat Tujuan	32
F. Profesionalisme Menurut Pandangan Islam	33

BAB III Metodologi Penelitian	34
A. Data Geografis	34
1. Letak Geografis	34
2. Sejarah Desa	35
3. Struktur Organisasi Desa	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
C. Jenis Penelitian	38
D. Subjek Penelitian	38
E. Sumber Data	39
F. Teknik Menentukan Informan Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Instrumen Pengumpulan Data	41
I. Teknik Analisa Data	41
J. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	42
BAB IV Hasil Penelitian	44
A. Program-program Kegiatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	44
B. Hambatan yang menjadi penyebab tidak tercapainya program kegiatan Kepala Desa	53
C. Pimpinan Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat menurut Fiqh Siyasah	59
BAB V PENUTUP	66
1. Kesimpulan	67
2. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang RI No.6 tahun 2014). Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governnance*) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme aparatur pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni, profesi aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas, dan pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam

menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreatifitas, inovasi, dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam observasi awal peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi di Desa Kecamatan Siabu. Permasalahan yang muncul diakibatkan kurangnya kerjasama antara Kepala Desa dengan masyarakat. Kepala Desa Huraba 2 menyebutkan beberapa program yang telah terlaksana dan tidak terlaksana. Program kerja yang telah terlaksana di Desa Huraba 2 antara lain, pertama bidang keagamaan, yaitu dilaksanakannya pembekalan dan praktek fardu-fardu kifayah misalnya saat ada orang meninggal. Kedua, bidang pendidikan yaitu dengan mendirikan sebuah perpustakaan dalam Desa yang bertujuan untuk mewujudkan gemar membaca dalam Desa tersebut. Sedangkan program yang tidak terlaksana dalam Desa Huraba 2 yaitu kurang efektifnya penggunaan poskamling. Di Desa Huraba telah didirikan poskamling namun tidak dimanfaatkan oleh warga sekitar. Sedangkan poskamling berfungsi untuk menjaga keamanan desa dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Hal ini diakibatkan

kurangnya kerjasama warga di Desa Huraba 2. Selain hal itu, gotong royong merupakan salah satu program kerja Desa Huraba yang kurang efektif pelaksanaannya.¹

Hasil observasi awal di Desa Huraba 1 peneliti melihat ada beberapa masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Masalah yang paling utama yaitu kurangnya kerja sama antara Kepala Desa dan masyarakat terhadap hukum ataupun tata tertib yang berlaku di Desa Huraba 1 misalnya kurangnya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga banyak masyarakat menggunakan narkoba. Sedangkan Program kerja yang telah terlaksana di Desa Huraba 1 antara lain, pertama bidang keagamaan, yaitu dilaksanakannya pembekalan dan praktek fardhu fardhu kifayah misalnya saat ada orang meninggal. Kedua, bidang pendidikan yaitu dengan mendirikan sebuah perpustakaan dalam Desa yang bertujuan untuk mewujudkan gemar membaca dalam Desa tersebut. Sedangkan program yang tidak terlaksana dalam Desa Huraba 1 yaitu kurang efektifnya penggunaan poskamling. Hal ini diakibatkan kurangnya kerjasama antara kepala desa dan warga di Desa Huraba 1. Masyarakat masih kurang menjaga kebersihan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, karena kurang persediaan tempat buang sampah.²

Sedangkan hasil observasi awal di Desa Bonan Dolok, peneliti melihat kurangnya kebijakan untuk pengeringan sawah rodang sementara

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kasmir Dalimunthe, Kepala Desa Huraba 2, 8 September 2019

² Hasil wawancara dengan Bapak Domroh Parinduri, Kepala Desa Huraba 1, 8 September 2019

disana lebih bagus pendapatannya dibanding sawah yang lain. Namun kenyataannya ketika musim panen tiba, sawah selalu tergenang air sehingga hasil pendapatan panen berkurang. Selain itu kurangnya perhatian terhadap lingkungan terutama dalam hal kebersihan. Hal ini dapat dilihat seperti tersumbatnya selokan yang ada di lingkungan rumah warga dan akibatnya masyarakat mudah sakit malaria. Disisi lain kurangnya asupan air bersih bagi kehidupan masyarakat.³

Dari berbagai permasalahan diatas hendaknya ada kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat di Desa masing-masing, agar tercapai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat Desa. Selain itu Kepala Desa hendaknya lebih memahami apa saja kekurangan masyarakat dan bersikap lebih bijak dalam pelaksanaan program kerja di Desa dengan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, sehingga muncul rasa kedekatan antara Kepala Desa dengan masyarakatnya.

Kriteria-kriteria pemimpin dalam fiqh siyasah antara lain beragama Islam, harus adil, harus pandai menjaga amanah dan profesional, berwarga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam. Dari kriteria tersebut kita telah melihat salah satunya adalah amanah dan profesional. Seperti yang tercantum dalam Q.S Yusuf: 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: *berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*

³Hasil wawancara dengan Bapak Sapril Mansur, Kepala Bonan Dolok, 9 September 2019

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melakukan rancangan penelitian dengan judul **“Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari karakteristik kepemimpinan fiqh siyasah Di Kecamatan Siabu Mandailing Natal”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana program-program kegiatan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal!
2. Apa hambatan yang menjadi penyebab tidak tercapainya program kegiatan Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal!
3. Bagaimana pemimpin Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat menurut Fiqh Siyasah di kecamatan Siabu!

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program-program kegiatan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui hambatan yang menjadi penyebab tidak tercapainya program kegiatan Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat menurut fiqh siyasah di Kecamatan Siabu Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui pemimpin Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat menurut Fiqh Siyasah di kecamatan Siabu

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan terhadap wawasan ke ilmunan bagi mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara.
2. Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus bahan masukan dalam meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa untuk mengetahui profesionalisme kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang profesionalisme kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya makna ganda dalam memahami istilah penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah berikut:

1. Profesionalisme

Profesionalisme adalah berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus dalam melakukannya.⁴ Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesian Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hlm. 584

suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus.⁵

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang-orang agar mereka bersedia bekerja sesuai dengan keinginan pemimpin.⁶

3. Kepala Desa

Kepala wilayah adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam suatu wilayah.⁷ Salah satu bagian dari kepala wilayah yaitu kepala desa. Kepala desa adalah suatu penguasa dalam kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat dalam wilayahnya berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui.⁸

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan semua pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai individu, kelompok, maupun badan hukum yang berfungsi sebagai penerima pelayanan publik secara langsung ataupun tidak langsung.⁹ Masyarakat adalah sejumlah manusia dengan maksud

⁵Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. Ke-3, hlm.105

⁶ Burhanuddin, dkk, *Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh Kabupaten Aceh Barat* Vol.4, No.1, Februari 2016

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 671

⁸Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 54

⁹*Ibid.*, hlm. 127.

sebanyak-banyaknya yang terikat dalam suatu budaya yang dianggap sama.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

1. Sarianni, skripsi dengan judul *Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqih Syiasah Dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Penelitian ini membahas tentang pemilihan kepala negara dalam Fiqh Siyasah, pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara,
2. Rahmapulungan, skripsi dengan judul *proses pemilihan kepala desa tahun 2017 desa silaiya kec. Sayur matinggi menurut perfektif fiqh siyasah*. Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala desa secara umum dan dalam persfkti ffiqih siyasah di desasilaiya kec. Sayurmatinggi

G. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan lebih sistematis dan memudahkan pembaca dalam memahaminya, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan

BAB II, Tinjauan Pustaka yang meliputi, Pemerintahan Desa, Profesionalisme, Pemimpin, Masyarakat.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 885

BAB III, Metodologi Penelitian, yang meliputi: Letak Geografis, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Menentukan Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, serta Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

BAB IV adalah hasil penelitian, meliputi tingkat keprofesionalan kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal, pemimpin masyarakat yang adil makmur dalam mensejahterakan masyarakat menurut pandangan Fiqh Siyasah di kecamatan Siabu, Hambatan yang menjadi penyebab tidak tercapainya profesionalisme kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal.

BAB V yaitu Penutup yang meliputi: Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Profesionalisme

1. Pengertian Profesionalisme

Istilah profesionalisme berasal dari kata *professio*, dalam Bahasa Inggris *professio* memiliki arti yaitu suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental dari pada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulis, dan lain-lain. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi:

- a. Kreatifitas (*creativity*).
- b. Inovasi (*innovasi*).
- c. Responsifitas (*responsivity*).¹

2. Ciri-ciri Profesionalisme

Pemimpin dapat dikatakan bersifat profesionalisme jika memiliki keahlian dan pendapatan. Kedua hal itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Jadi seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme ketika memiliki dua hal pokok tersebut, yaitu keahlian

¹ Melisa Rosali Tumangkeng, *Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa*

(kompetensi) dan kelayakan sesuai bidang tugasnya dan mendapat gaji sesuai kebutuhan hidupnya.² Adapun ciri-ciri secara mendasar dari makna profesionalisme yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan spesialisasinya menuntut seseorang melaksanakan jabatan atau pekerjaan dengan penuh kapabilitas, kemandirian dalam mengambil keputusan (*independent judgment*), mahir dan terampil.
- b. Motif dan tujuan utama seseorang memilih jabatan/pekerjaan itu adalah pengabdian kepada manusia, bukan imbalan kebendaan (bayaran) yang menjadi utama
- c. Terdapat kode etik jabatan yang secara sukarela diterima menjadi pedoman perilaku dan tindakan kelompok profesional yang bersangkutan. Kode etik menjadi standar perilaku pekerjaan.
- d. Terdapat kesetiakawanan seprofesi, yang mewujudkan dengan saling menjalin kerja sama dan tolong-menolong antar anggota dalam komunitas tertentu.³

Selain itu ciri umum makna profesionalisme yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi.
- b. Kemampuan untuk memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus yang dikuasai)

²Bimer Ambarita, "Profesionalisme, Esensi Kepemimpinan, Dan Manajemen Organisasi", *Jurnal Unimed*, Vol 6. No 2, September 2013

³Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Pers, 2009), hlm. 28

- c. Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimilikinya.⁴

3. Syarat-syarat Profesionalisme

Tidak semua pekerjaan atau profesi dikatakan profesional, karena lebih mementingkan layanan kemanusiaan dibanding dengan kepentingan pribadi. Adapun syarat-syarat profesionalisme yaitu:

- a. Seseorang profesionalisme relatif mementingkan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus mendukung keahliannya.
- b. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta dapat mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatannya.
- c. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja.
- d. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual tinggi.
- e. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya.
- f. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.
- g. Memandang profesi sebagai suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota permanen.⁵

⁴Sudarwan Danim, *Profesionalisme dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 56

⁵M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: 1993), hlm. 105

4. Profesionalisme Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah

Profesional merupakan paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "*Rasulullah shallallah'alaihiwasallam* bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu" (Bukhari - 6015)

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ciri-ciri pekerja (profesional) yang baik dalam beberapa ayat, salah satunya dalam QS al-Qashas 26, berbunyi :⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَأُ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

B. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena, pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang diemban pemerintah desa

⁶Baroroh Okta Imroatul, "Pengaruh Profesionalisme Guru terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqh Siyasah di Mts Ihyaul Ulum Dusun Gresik", IAIN Sunan Ampel Surabaya, 15 November 2011

adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan secara “radikal”, baik dari segi kepemimpinan maupun kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan desa, sehingga benar-benar semakin mengarah pada praktik good governance, bukan bad governance.⁷

Pemerintah desa menjadi sentrum governance desa yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Kedudukan kepala desa adalah sebagai personifikasi pemerintah desa. Pemerintah desa dan kepala desa merupakan bagian dari mata rantai birokrasi negara yang menjalankan fungsi regulasi dan kontrol pada wilayah tersebut melalui pelayanan administratif, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan pelayanan bagi warganya di desa.⁸

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur

⁷Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 19, No 2, November 2015

⁸*Ibid.*, hlm. 118

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Desa diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dalam lingkungan yang warganya saling kenal mengenal, corak kehidupannya relatif homogen, dan banyak tergantung pada alam.¹⁰

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama APBD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah dapat persetujuan bersama APBD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif

⁹Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005, Tentang Desa Pasal 1 ayat 5 dan 6

¹⁰Heri Kusmanto, Dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan* (Medan: Bitra Indonesia, 2007), hlm. 2

- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Syarat-Syarat Menjadi Kepala Desa

Peraturan RI Nomor 72 Tentang desa menyebutkan syarat-syarat menjadi kepala desa yaitu:

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- b. setia dan taat kepada pancasila dan UUD 1945
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan UUD 1945 serta kegiatan terlarang lainnya
- d. berpendidikan sekurang kurangnya sekola lanjutan tinggi atau berpengetahuan sederajat
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
- f. sehat jasmani dan rohani
- g. tidak mengalami gangguan kejiwaan
- h. berkelakuan baik, jujur, dan adil
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukakn pidana
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

¹¹Peraturan pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005, Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 dan 2

- k. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat setempat
- l. bersedia di calankan sebagai kepala desa
- m. memenuhi syarat syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang di ataur dalam perundang-undangan

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Profesionalitas
- f. Efektifitas dan efisiensi
- g. Kearifan lokal
- h. Keberagaman dan partisipatif.¹²

4. Kewenangan dan Pemerintahan Desa

Adapun bentuk kewenangan dalam pemerintahan desa, sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota

¹²Badan Pemeriksa Keuangan, *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*, 2015, hlm.14

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

C. Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu baik dalam kelompok kecil maupun besar yang memiliki pengaruh satu sama lain sehingga memiliki kebiasaan tradisi, sikap kebatinan dan persatuan dalam kesatuan sosial. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan.¹⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa prinsip-prinsip pokok pelaksanaan pembangunan agar kehidupan masyarakat desa sejahtera. Adapun prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan tersebut antara lain:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan secara terpadu, dengan mengembangkan sikap gotong royong.
2. Pembangunan Desa dianggap sebagai bentuk sebuah proses, sebagai cara, dan sebagai program kesejahteraan.
3. Sasaran utama adalah mempercepat pertumbuhan menjadi masyarakat yang sejahtera, meningkatkan ekonomi dan pemerataan pembangunan.¹⁵

Pemerintah desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua

¹³*Ibid.*, hlm. 7

¹⁴Nurul hidayah, "Kesiapan Psikologis Masyarakat Pedesaan Dan Perkotaan Menghadapi Diversifikasi Pangan Pokok", *Jurnal Humanitas*, Vol. VIII, No.1 Januari 2011

¹⁵ I Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 53

program. Memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian fungsi desa dalam konteks otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan kelembagaan desa memiliki arti yang strategis. Pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sasaran utamanya adalah “pengentasan kemiskinan”.

Kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, politik). Berikut beberapa penyebab kemiskinan antara lain:

1. Rendahnya taraf pendidikan
2. Rendahnya derajat kesehatan
3. Terbatasnya lapangan kerja dan
4. Kondisi keterisolasian.

Kebijakan Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, telah melakukan pembangunan sosial melalui program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Pembangunan sosial sebenarnya adalah sistem totalitas pembinaan yang dirancang untuk

memaksimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan dengan mendayagunakan unsur manusia, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, Tujuannya mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Selain kesejahteraan dilihat berdasarkan pandangan kultural perspektif lokal, banyak didasarkan pada pandangan kultural masyarakat yang bersangkutan.¹⁶ Pemaknaan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian (charity)
2. Setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri
3. Memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.¹⁷

D. Pemimpin Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Pemimpin

¹⁶Suyanto dan Bambang Pudjianto, Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Sejahtera (Studi Kasus di Kabupaten Sragen), *Jurnal Kementerian Sosial*, Vol. 5, No. 01, September - Desember, Tahun 2015

¹⁷Andi Sopandi, Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bekasi, *Jurnal Kybernan*, Vol. 1, No. 1 Maret 2010

Dalam wacana fiqih siyasah pemimpin biasanya diidentik dengan khilafah. keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Pemimpin dalam pandangan Islam secara spiritual pemimpin diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt, baik secara bersama-sama maupun perseorangan. Allah swt berfirman dalam Q.S An-nisa: 59 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pemimpin adalah kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari segi ajaran Islam pemimpin merupakan orang yang menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah swt.¹⁸ Pemimpin Islam dikatakan sejati terlihat pada kesepadanan antara perkataan dengan perbuatan, bersifat mulia, rendah diri, tidak sombong, jauh dari kehidupan yang berlebihan, bersikap jujur dan adil, dan menyerahkan kepemimpinannya kepada

¹⁸Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Prss, 1993), hlm. 16-28

wahyu Allah dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, seorang pemimpin akan berorientasi pada perbaikan kehidupan rakyatnya.¹⁹

Kepemimpinan secara umum merupakan upaya seseorang mempengaruhi sekelompok orang untuk bersama-sama mencapai sebuah tujuan.²⁰ Kepemimpinan adalah kepribadian yang memancarkan pengaruh dan wibawa sedemikian rupa sehingga sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya.²¹

2. Karakter Pemimpin

Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan antara lain:

a. Siddiq (benar)

Mencintai dan berpihak pada kebenaran yang datangnnya dari Allah, sehingga seluruh pikiran, tindakan dan ucapan selalu benar. Seorang pemimpin berarti semua keputusan dan perbuatannya benar. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Najm: 4-5 sebagai berikut:

إِنَّهُ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾

Artinya: 4. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). 5. yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.

b. Amanah

¹⁹Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.66

²⁰Sarlito W. Sarwono, dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 190

²¹Prajudi Atmosudirjo, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: 1976)

Kata amanah memiliki maksud dua hal, pertama apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT, karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Jadi, kekuasaan yang dimiliki amanah dari Allah yang bersifat relatif dan kelak harus dipertanggung jawabkan. Kedua, pelaksanaan amanah diperlukan amanah yaitu sikap pertanggung jawaban, jujur, dan memegang tegus prinsip. Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-A'raf: 68

أَبْلِغْكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ أَمِينٌ نَاصِحٌ ﴿٦٨﴾

Artinya: *aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu*".

c. Adil

Berdasarkan petunjuk Allah, seorang pemimpin harus bersikap adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Keadilan tersebut berlaku dalam bidang politik, wilayah maupun perekonomian. Jadi, hendaknya setiap pemimpin harus menegakkan keadilan dimana pun mereka berada.²² Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Jin: 28

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ

شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

²²Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.121

Artinya: *Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya Kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,*

d. Tabligh (menyampaikan)

Sifat ini sejalan dengan sifat amanah, meskipun yang dimaksud terutama sekali bukan terpeercaya, tetapi memiliki kemampuan dalam menyampaikan tugas atau informasi dengan jelas maksudnya dan dapat dimengerti.

e. Fatanah (pandai)

Seorang pemimpin harus cerdas dan mampu memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi masyarakatnya sehingga tidak ada masalah yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran islam.²³

Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki pemimpin secara umum adalah:

- a. Berpandangan jauh
- b. Bertindak dan bersikap bijaksana
- c. Berpengetahuan luas
- d. Bersikap dan bertindak adil
- e. Berpendirian teguh
- f. Optimis bahwa misinya berhasil
- g. Berhati ikhlas

²³Hadari Nawawi, *Op., Cit*, hlm. 274

h. Mampu berkomunikasi yang baik dan berpenampilan baik.²⁴

3. Tipe-tipe kepemimpinan

Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana prinsip dalam kepemimpinan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali Imran: 118²⁵

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا
مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ
بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan mu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Selain itu ada beberapa tipe kepemimpinan secara umum, antara lain:

- a. Kepemimpinan paternalistis, dengan sifat kebapaan. Tipe kepemimpinan ini memiliki beberapa sifat, antara lain:
 - 1) Pemimpin yang menganggap bawahannya seperti anak nya yang senantiasa perlu dibimbing dan dikembangkan
 - 2) Pemimpin bersikap terlalu melindungi
 - 3) Pemimpin hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif

²⁴Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islma*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 38

²⁵J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 7

- 4) Selalu bersikap maha tahu dan benar
- b. Kepemimpinan otokratik, yaitu pemimpin yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus di patuhi.²⁶
- c. Kepemimpinan demokratis atau partisipatif, yang bersifat tidak akan melakukan kegiatan tanpa mengkonsultasikan dengan bawahannya, dan mengikut sertakan pendapat bawahan sebelum membuat keputusan.
- d. Kepemimpinan *laissez faire*, yaitu pemimpin yang hanya berkedok sebagai pemimpin tetapi kenyataannya tidak pernah memimpin.
- e. Kepemimpinan *free rein*, yaitu model pemimpin yang menggunakan sedikit kekuasaan yang lebih banyak memberikan kebebasan pada bawahannya untuk melakukan kegiatan.²⁷

E. Kepemimpinan pada Masa Nabi Muhammad SAW

Dalam sejarah kepemimpinan islam, sifat keterbukaan dan kesediaan menerima teguran dan kritik telah di tunjukkan oleh abu bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah pertama. setelah wafatnya nabi kaum muslim di madina membentuk kelompok-kelompok politik yang berbeda seperti Anshar Muhajirin dan Bani Hasim.²⁸

Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dengan Khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Muhammad SAW, kedua dimensi ini berhasil

²⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan-Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm.2

²⁷ M. Nasir Budiman, Alwahidi Ilyas, *Kepemimpinan Dalam Islam (Suatu Tinjauan Normatif)*, (Medan: Nadiya Foundation, 2003), Hlm.24

²⁸ Mumtaz Ahmad, *Hak Melindungi Undang-Undang*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 1996), hlm. 63

dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Muhammad SAW, menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekah dengan penekanan pada aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode Mekah ini. Ayat-ayat Al-qur'an yang diturunkan pada masa ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elit ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai ketimpangan sosial lainnya.²⁹

Tidak heran kalau pada periode Mekkah pengikut Nabi Muhammad sebagian besar terdiri dari orang-orang yang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam tatanan masyarakat. Mereka merasa dimuliakan di dalam Islam, karena Islam tidak mengenal stratifikasi sosial yang bersifat material. Semua orang sama dalam pandangan Islam. Hanya taqwa yang membedakan kualitas mereka disisi Allah. Akan tetapi, karena pengikut Muhammad masih sedikit, pesan-pesan wahyu Al-Qur'an belum begitu efektif berjalan ditengah-tengah politik dan ekonomi Quraisy. Pengikut Nabi Muhammad yang minoritas belum dapat tampil sebagai komunitas yang membongkar tatanan masyarakat quraisy Mekkah yang timpang tersebut.³⁰

Pada masa pemerintahan Rasulullah dapat dilihat bahwa aktivitas beliau tidak hanya dibidang risalah kenabian untuk mengajarkan wahyu yang diterimanya dari Allah SWT kepada manusia. Namun, Rasulullah juga menjelaskan tentang keduniaan untuk membangun kebutuhan

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 31

³⁰*Ibid.*, hlm.31

spiritual dan material masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, penganut agama dan keyakinan yang berada dibawah kepemimpinannya. Rasulullah telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemashlahatan dunia dan kahirat bagi umatnya. Prinsip yang diterapkan Rasul dalam kepemimpinannya yaitu musyawarah, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, persamaan bagi semua lapisan sosial, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, amar makruf dan nahi munkar, dan prinsip ketakwaan.³¹

Kepemimpinan Nabi Muhammad sangat unik. Sebagai Rasul Allah beliau bertugas menyampaikan pesan-pesan wahyu Al-qur'an. Sebagai realisasi dari dakwahnya, beliau mendapat kepercayaan untuk memimpin umat Madinah dan mendirikan Negara Madinah. Jadi kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai kepala Negara Madinah menyatu dengan tugas-tugas kerasulannya. Karena itu beliau hanya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah.³²

1. Kualitas Kepemimpinan

Rasulullah memiliki sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Rasulullah sangat ramah, sopan, rendah hati, penyayang dan menarik hati orang-orang sehingga umat Rasul bersedia

³¹J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, hlm. 101

³²Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hlm. 44

menegorbankan segalanya untuk Rasulullah. Selain itu ada beberapa sikap yang disukai setiap orang yaitu.³³

a. Keberanian dan keteguhan hati

Nabi Muhammad adalah seseorang yang pemberani. Hal ini dapat dilihat setiap menghadapi berbagai bahaya dan ancaman pada saat yang sama, tetapi tidak pernah menunjukkan kelemahan atau ketakutan. Rasul telah mengalami berbagai pertempuran dan bahkan dalam menghadapi serangan yang sangat berat, tidak pernah beranjak satu sentipun dari tempat. Selain itu beliau selalu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan penuh keberanian dan keteguhan.

b. Pengendalian diri

Pengendalian diri sangat bermanfaat, bagi setiap pemimpin. Banyak orang yang berani dan perkasa merasa takut dan panik menghadapi ketegangan pertempuran dan akhirnya runtuh. Namun, Nabi Muhammad dapat mengendalikan diri sepenuhnya dalam menghadapi semua situasi, baik perang maupun damai.

c. Kesabaran dan daya tahan

Nabi Muhammad melewati masa yang penuh dengan penderitaan dan kepahitan di Makkah, tetapi beliau menjalaninya dengan sabar dan tidak pernah bersungut dan mengeluh. Walaupun

³³ Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer* (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 63

beliau diperlakukan dengan tidak baik, tetapi beliau selalu memperlakukan musuhnya dengan sikap yang sangat baik.

d. Kepribadian

Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang sangat menarik sehingga semua sahabat mencintainya lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Nabi Muhammad memiliki kepribadian dan kekuatan bicara yang memikat dan menonjol, sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan akan ketulusan dan kejujuran pesannya. Jadi, tidak heran jika beliau dapat lekat dihati banyak orang di Negerinya dan siap mengorbankan apapun juga, bahkan nyawa mereka sendiri untuknya, tetapi tidak akan membiatkan kotoran mengotori kaki Nabi Muhammad.

e. Keadilan dan persamaan

Hal ini merupakan kualitas kepemimpinan yang penting dalam diri Nabi Muhammad. Beliau menuntut perlakuan yang adil bagi semua orang dan membenci diskriminasi diantara manusia. Beliau memperlakukan semua orang sama rata dan tidak membedakan siapapun bahkan pada dirinya sendiri.³⁴

2. Langkah-langkah Untuk Memperkuat Tujuan

a. Ketaatan

Ketaatan pada perintah pimpinan, terutama dalam keadaan perang merupakan suatu keharusan untuk keberhasilan tujuan,

³⁴*Ibid.*, hlm. 65-70

karena tanpa ada kepatuhan, tidak ada seorangpun pemimpin yang dapat mencapai tujuannya. Nabi Muhammad menyadari sepenuhnya arti penting kepatuhan dan menekankan kenyataan bahwa pengikutnya harus mengikuti perintah para pemimpin tanpa ragu. Jadi, orang beriman diperintahkan untuk tidak berbantahan dengan pemimpin dan mengasingkan diri dari masyarakat, tetapi mendengarkan dan mematuhi dalam hal ketaatan.

b. Kesatuan

Kesatuan diperlukan untuk mencapai keberhasilan karena semua harus bersatu dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jika orang beriman tetap bersatu dalam mematuhi utusan Allah, maka akan diperkuat kedudukannya terhadap musuh dan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh kemenangan.³⁵

F. Profesionalisme Menurut Pandangan Islam

Islam memberi tuntutan kepada semua umat muslim agar saat bekerja dibidang apapun harus memiliki sikap dan perilaku profesional. Sikap profesionalisme menurut pandangan Islam antara lain:

- a. *Kafa'ah*, yaitu adanya keahlian dan kemampuan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Keahlian adalah suatu kemampuan untuk melakukan sebuah peran. Sedangkan kemampuan adalah

³⁵*Ibid.*, hlm. 80-82

kapasitas seorang individu dalam melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

- b. *Hummatul a'mal*, yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah sikap yang muncul dari kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Sedangkan semangat adalah keadaan pikiran saat batin tergerak untuk melakukan sesuatu tindakan.
- c. Amanah, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajibannya, serta tidak berkhianat terhadap jabatan yang sedang diduduki. Bertanggung jawab dalam hal ini adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.³⁶

³⁶Sulaiman, Tugas Wakil Kepala Daerah Di Bidang Politik Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Menurut Kajian Fiqih Siyasa, *Thesis, Library Administrator*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 14 November 2013

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Letak Geografis

a. Desa Huraba I

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Masyarakat
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lumban Dolok
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huraba II
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simaninggir

b. Desa Huraba II

Berdasarkan letak geografis wilayah, desa Huraba II berada antara $00^{\circ}02'23''$ (LU)- $99^{\circ}28'48''$ (BT) dengan batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huraba I
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan kebun masyarakat
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huraba I

c. Desa Bonan Dolok

- 1) Sebelah Timur berbatas dengan Sibuhuan, Palas
- 2) Sebelah Barat berbatas dengan Tapsel
- 3) Sebelah Utara berbatas dengan Desa Lumbanbinasa
- 4) Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Siabu

1. Sejarah Desa

a. Desa Huraba II

Dahulu kala cerita desa huraba terbentuk, yaitu datangnya seorang raja bermarga nasution yang bernama Sutan Patuan Batangari beserta rombongan yang mencari pemukiman. singkat cerita sesampainya mereka di sana tepat pada malam hari dan gelap, untuk mencari jalan saat itu mereka harus meraba, saat itulah mereka memberi nama Desa Huraba. Pada tahun 2002 desa huraba dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Hurab I dan desa Huraba II, dan sejak itu desa ini menjadi desa Huraba II.

Penduduk desa Huraba II bersal dari berbagai daerah yang berbeda beda, di mana mayoritas penduduknya dominan berasal dari provinsi Sumatera Utara, Sumatra Barat, dan ada juga dari daerah Pesisir. Tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah di lakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Huraba II dan secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan benturan antar kelompok masyarakat. Jumlah penduduk desa Huraba II sebanyak 2.135 jiwa yang terdiri dari laki-laki 977 jiwa dan Perempuan sebanyak 1158, terdiri dari 446 KK.

b. Desa Bonandolok

Sejarah Desa Bonan Dolok yaitu pada zaman dulu yang menemukan Desa ini adalah seorang perantau dari Bonan Dolok

Sibolga yang bermarga Panggabean. Nama desa ini dibuat Bonan Dolok karena nama Desa asalnya adalah Desa Bonan Dolok. Adapun letak geografis Desa Lumban Dolok menurut Profil Desa yaitu sebagai berikut:

3. Struktur Organisasi Desa

a. Desa Huraba I

Jumlah perangkat desa sebanyak 5 orang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa : Dumroh
- 2) Sekretaris Desa : Dorlan
- 3) Bendahara : Haholongan
- 4) Kepala Urusan Kemasyarakatan : Amir Husin
- 5) Kepala Urusan Pemberdayaan : Abdur Rahman
- 6) Kepala Urusan Pembangunan : Pangeran Rambe
- 7) Kepala Urusan Pemerintahan : Khairil Anwar

b. Desa Huraba II

Wilayah Di Desa Huraba II dibagi dalam 6 dusun yang di pimpin oleh kepala desa. Jumlah perangkat desa sebanyak 5 orang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa : Kasmir Dalimunthe
- 2) Sekretaris Desa : Sam'an Hasibuan
- 3) Kepala Urusan Kemasyarakatan : Amir Husin
- 4) Kepala Urusan Pembangunan : Salwan Pulungan
- 5) Kepala Urusan Pemerintahan : Rajab Efendi

c. Desa Bonandolok

Desa Bonan Dolok dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dibantu oleh beberapa aparatur Desa seperti Sekretaris, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kemasyarakatan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, dan lima orang Kepala Lorong.

- 1) Kepala Desa : Tohiruddin
- 2) Sekretaris : Tohiruddin
- 3) Bendahara : Ahmad Kadapi
- 4) KU Pemerintahan : Abdul Hadi
- 5) KU Kemasyarakatan : Ismail Marzuki
- 6) KU Pembangunan : Sehaedi

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa yang terdapat di Kecamatan Siabu. Adapun desa yang akan diteliti yaitu desa Huraba I, desa Huraba II, dan desa Bonandolok. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu peneliti telah mengetahui lokasi penelitian tersebut dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian karena tidak jauh dari lokasi tempat tinggal peneliti.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siabu terhitung dari bulan Maret 2019-Agustus 2019

C. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, studi kasus merupakan pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek/informan penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah.¹ Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan dekskriptif. Menurut Moh. Natsir, metode dekskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan penelitian, yaitu sumber tempat untuk mendapatkan keterangan sebuah penelitian. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal secara keseluruhan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif sangat penting bukan hanya

¹Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 3

² Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63

sekedar memberi respon melainkan juga observasi penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Adapun sumber data yang dalam penelitian ini ada dua:

1. Data primer yaitu data penelitian langsung dari informan. Data diambil dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Aparat Desa, dan masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal.
2. Data sekunder adalah data tambahan atau pelengkap untuk menguatkan data primer. Data sekunder ini diambil dari buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan.

F. Teknik Menentukan Informan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Untuk menentukan informan penelitian ini adalah informan yang diambil oleh penelitian ini adalah masyarakat dan Kepala Desa, serta KU di Desa Huraba I, Huraba II, dan Bonandolok. Hasil wawancara dengan masyarakat desa Huraba I, Huraba 2 dan Bonandolok melihat bahwa kemandirian desa masih kurang. Karena kepala Desa masih kurang efektif dalam menggerakkan masyarakat memanfaatkan poskamling yang ada di Desa. Dalam hal pertanian masyarakat masih butuh penyuluhan mengenai pertanian. Begitu juga dalam hal pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa masih kurang efektif dalam pembagian tugas untuk kemajuan Desa. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, masyarakat masih

membutuhkan banyak penyuluhan menjadi masyarakat mandiri demi kemajuan Desa.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah alat penumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³ Dalam penelitian ini yang dipakai adalah observasi partisipan yaitu penulis turut ambil bagian dalam kegiatan yang diteliti. Penulis ikut merasakan dan mengalami apa yang dirasakan oleh informan penelitian karena pada dasarnya penulis adalah salah satu dari bagian kelompok akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan terhadap objek penelitian, yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi atau keterangan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁴

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana penulis tidak menggunakan

³Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70

⁴Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.180

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, pedoman wawancara yang digunakan hanya pokok penting dari pembahasan. Pedoman wawancara yang dilaksanakan dengan menulis pokok penting dari permasalahan yang akan diteliti, kemudian pertanyaan tersebut dapat dikembangkan oleh penulis sewaktu melaksanakan wawancara sampai data yang terkumpul dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, pertanyaan yang dikembangkan melalui pertanyaan pokok tersebut dijadikan sebagai data penopang hasil penelitian.

H. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penulis menggunakan, panduan wawancara, berupa pertanyaan-pertanyaan. Yakni pertanyaan pokok yang telah disusun oleh penulis sebelum melaksanakan penelitian. Dengan serangkaian tanya jawab dengan masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal.

I. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam teknik analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif artinya semua data yang didapatkan dideskripsikan secara rinci dan kemudian diikuti dengan pembahasan teoritis untuk melihat relevansinya. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diinterpretasikan. Dibawah ini terdapat tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis, yakni:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, pemusatan perhatian penyederhanaan serta transformasi data kasar yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dari proses yang terjadi dilapangan. Data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian kemudian dipilih kembali, atau dipusatkan pada pembahasan dan kemudian disederhanakan.
2. Penyajian data, yaitu ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Upaya penarikan kesimpulan, setelah data tersebut selesai disajikan maka tahapan terakhir yang dilakukan penulis adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

J. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan data sebagai perbandingan.⁵

⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: AUP, 2001), hlm. 229

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data atau menguji kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
2. Membandingkan yang dijelaskan oleh mahasiswa dengan yang dijelaskan oleh kepala Desa melalui hasil wawancara.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Program-program kegiatan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siabu Mandailing Natal

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti memperoleh jawaban hasil wawancara yang bervariasi mengenai program kerja kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bagaimana progres Kepala Desa dan bagaimana pelaksanaan tugas dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat

1. Program Kegiatan Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Suritem, warga desa Huraba II, bahwa Suritem belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan dalam kepemimpinan Kepala Desa saat ini. Kesejahteraan yang di maksud dalam hal ini yaitu dibidang pembangunan, seperti pembangunan jalan pemukiman. bahwasanya pembangunan jalan pemukiman pembangunan itu tidak tahan lama hanya pembangunan tersebut bertahan hanya jangka 9 bulan maka bangunan jalan pemukiman tersebut rusak dan retak retak dan pembangunan itu tidak berkelanjutan begitu juga dengan pembangunan jalan area persawahan pembangunan memang di lakukan di area persawahan tetapi bangunan tersebut tidak tahan dan juga banguannya di area persawahan masih kurang hanya bangunan tersebut di lakukan di pinggir pinggir jalan

sementara yang di butuhkan masarakat, pembangunan di area persawahan tidak sepenuhnya di pinggir jalan.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Huraba I, bahwa Pemerintah Desa juga memfasilitasi pembangunan-pembangunan di desa maupun di area persawahan untuk kenyamanan dan kesejahteraan dan mempermudah aktivitas masyarakat.²

Hasil wawancaradengan KU Pembangunan Desa Huraba I, bahwa Setelah datang anggaran dana desa sehingga terjadi pembangunan desa baik ia berupa pembangunan jalan lorong lorong maupun jalan usaha tani dan seterusnya di area persawahan.³

Hasil Wawancara dengan KU Pembangunan Desa Huraba II, bahwa Pembangunan desa bertujuan untuk menata ruang lingkup desa agar tertib dan teratur, seperti pembangunan jalan ke area persawahan karena di desa Huraba termasuk lumbung padi atau pendapatan padi terbesar di kecamatan siabu.⁴

2. Bidang Olahraga

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Kepala Desa bahwa perangkat desa memberi area dalam bidang olahraga seperti memfasilitasi lapangan futsal secara gratis, sehingga lebih bermanfaat terutama bagi anak muda yang ada di Desa ini. Tetapi berdasarkan

¹ Hasil Observasi Peneliti

² Dorlan, Sekretaris Desa Huraba I, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba I

³ Pangeran Rambe, KU Pembangunan Desa Huraba I, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba I

⁴ Salwan Pulungan, KU Pembangunan Desa Huraba II, *wawancara*, 8 Oktober 2019 di Desa Huraba II

hasil wawancara dengan masarakat desa huraba satu dan dua aparat desa hanya memfasilitasi lapangannya saja tidak untuk peralatannya, seperti bola sepatu dan kostum sementara kalau dilihat di kampung kampung lain kepala desanya memfasilitasi semua peralatan olah raga.⁵

3. Bidang Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Kepala Desa II aparat desa juga memberikan pembelajaran dalam bidang pertanian. Kepala Desa II juga membuat beberapa program untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya dalam hal pertanian. Kepala Desa menurunkan alat berat secara gratis ke sawah agar warga lebih mudah dalam membajak persawahan sehingga lebih memudahkan pekerjaan sawah warga.⁶ Tetapi berdasarkan hasil wawancara dari ahmad paisal masarakat desa huraba II tidak semua masarakat desa merasakan kemudahan dalam pertanian seperti penurunan alat berat dan gratis, penurunan alat berat itu hanya di turunkan kesawah orang tinggi di desa saja tidak semua masarakat yang merasakan nya padahal masarakat sangat memerlukan alat berat tersebut untuk mengelola area persawahannya.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Huraba I, bahwa, masyarakat Desa Huraba I ini bermata pencaharian dibidang pertanian, jadi Kepala Desa membuat kerjasama dengan PPL kecamatan yang menaungi Desa ini. Sehingga para PPL diminta untuk

⁵Suritem, warga Desa Huraba II, *Wawancara*, 30 September di Desa Huraba II

⁶Suritem, warga Desa Huraba II, *Wawancara*, 30 September di Desa Huraba II

⁷Ahmad Faisal, warga Desa Huraba II, *Wawancara*, 30 September di Desa Huraba II

membuat penyuluhan-penyuluhan pada petani untuk peningkatan hasil panen di Desa. Dari 26 Desa yang ada di Kecamatan Siabu hasil panen Desa Huraba I lebih tinggi. Selain itu setelah dilakukannya panen di Desa ini biasanya melakukan kegiatan seperti memberi makan anak yatim yang ada di Desa ini sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.⁸ Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan masarakat, kerja sama antara kepala desa dengan pihak PPL kecamatan itu tidak ada gunanya karna seharusnya pihak ppl itu langsung turun ke sawah warga untuk memeriksa keadaan dan kesehatan padi tersebut tetapi buktinya pihak ppl dan kepala desa tidak turun langsung ke sawah dan hanya mengambil dokumentasi dan banyak warga desa protes dengan hal tersebut.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Huraba II, bahwa, Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Desa melihat apa yang menjadi potensi di Desa. Dalam hal ini penduduk Desa Huraba yang mayoritas petani, maka akan prioritaskan produksi dalam bidang pertanian. Selain membangun infrastruktur dibidang pertanian telah dibentuk kelompok-kelompok tani dan memberikan penyuluhan serta mengupayakan penunjang pertanian seperti penyuluhan dan penyediaan bibit serta alat-alat pertanian. Tetapi berdasarkan wawancara masyarakat bahwasanya peningkatan kesejahteraan masarakat seperti melihat apa yang menjadi

⁸ Domroh Parinduri, Kepala Desa Huraba I, *wawancara*, 29 September 2019 di Desa Hurab I

⁹ Hasil Observasi Peneliti

potensi di desa dan produksi pertanian di desa dan membangun infrastruktur bidang pertanian dan kelompok kelompok tani itu tidak lagi berkelanjutan di desa huraba II karna tidak adalagi perintah dan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa maka seperti kelompok tani hanya namanya aja yang ada tapi tidak ada kegiatan yang di lakukan karna tidak ada perintah dari kepala desa.¹⁰

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bonan Dolok, bahwa, Yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bonan Dolok salah satunya yaitu membuka akses-akses jalan ketempat usaha masyarakat, seperti jalan-jalan ke sawah yang akan memperlancar transpot pengangkutan hasil usaha pertanian masyarakat.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan masarakat akses akses ketempat usaha masarakat itu memeang sangat di perlukan namum akses akses jalan itu tidak tahan karna bangunannya tidak bagus dan kurangnya pembangunannya dan juga yang di inginkan masarakat akses pembangunan jalan teranfortasi seharusnya sampe ke area perkebunan yang ada di gunung (dolok) tetapi nyatanya tidak sampai hanya sampai di area persawahan saja.

4. Bidang Ibadah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa bahwa, Dalam bidang ibadah kepala desa membuat program seperti pengajian di Desa

¹⁰Kasmir Dalimunthe, Kepala Desa Huraba II, *Wawancara*, 28 September 2019 di Desa Huraba II

¹¹Sapril Mansur, Kepala Desa Bonan Dolok, *wawancara*, 30 September 2019 di Desa Bonan Dolok

dan pembelajaran tentang adat istiadat, serta memberikan fasilitas bagi para petani. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat bahwa pengajian pengajian tersebut tidak lagi berkelanjutan contoh pengajian antara naposo nauli bulung di malam jum'at tidak ada lagi naposo nauli bulung yang mengaji yasinan di malam jum'at begitu juga dengan keadaan wc mesid sangat lah kotor dan jarang di bersihkan.

5. Bidang Adat Istiadat dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Marzuki, warga Desa Bonan Dolok, bahwa, Kepemimpinan Kepala Desa di Bonan Dolok tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan oleh masyarakat, misalnya tidak sepenuhnya kemudahan akses untuk usaha masyarakat tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat seperti kebutuhan air bersi di desa bonandolok belum ada lagi tindakan aparat desa untuk mengalurkan air bersi ke tempat desa bonandolok yang di butuhkan air bersih. Hanya saja, masarakatnya yang sering menghimbau kepada masyarakat untuk bergotong royong yang bertujuan untuk agar air bersih ada di tempat tersebut.¹²

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Huraba I, bahwa Kebijakan pemerintah desa dalam melindungi dan mengayomi masyarakat Desa Huraba I memfasilitasi pembelajaran adat istiadat

¹² Marzuki, Warga Desa Bonandolok, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Bonandolok

untuk modal pengetahuan kepada masyarakat dan diperaktekkan di hari-hari pernikahan warga.¹³

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Huraba II, bahwa Kebijakan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat yaitu meladeni masyarakat dengan diadakannya musyawarah untuk menjalankan program desa yang bertujuan sebagai kepentingan desa yang sejahtera.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan masarakat bahwasanya memang sering aparat desa melakukan musyawarah musyawarah mengenai program program desa namun ada beberapa pogram desa yang tidak pernah dilakukan dan diperbaiki contohntya pengeringan sawah rodang di desa huraba apabila datang hujan yang deras maka sawah rodang akan genang, sementara dari sawah rodang tersebut lebih banyak pendapatan padi masarakat sementara itu sampai sekarang belum ada tindakan kepala desa dan aparat desa.

6. Bidang Pemberdayaan

Hasil wawancara dengan KU Pemberdayaan Desa Huraba I, bahwa Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang pemberdayaan Mendata masarakat yang kurang mampu untutuk mengikut sertakan dalam memberikan bantuan yang didanai dana desa.¹⁵ Dan berdasarkan hasil wawancara masyarakat desa tidak sepenuhnya mereka mendapat bantuan dana desa, seperti ada yang lebih layak

¹³Dorlan, Sekretaris Desa Huraba I, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba I

¹⁴Sam'an Hasibuan, Sekda Desa Huraba II, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba

mendapatkan bantuan tetapi dia tidak mendapatkan bantuan desa, sementara seharusnya dia tidak lagi mendapatkan bantuan desa tapi dia mendapat bantuan desa.

7. Bidang Kemasyarakatan

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa Huraba II, bahwa Apabila ada terjadi suatu perkelahian, kemalangan wirid-wirid atau pengajian-pengajian maka bagian kemasyarakatanlah yang ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan. Apabila ada suatu kemalangan untuk memanggil kerabat di Desa Huraba dan apabila ada perwiritan ataupun pengajian maka bagian kemasyarakatan juga harus ikut menyelesaikan acara tersebut di desa huraba ikut dalam pelaksanaan tersebut sebelum muncul Kepala Desa. Selain itu apabila ada suata permasalahan di desa Huraba seperti perkelahian maka bagian kemasyarakatan menjadi orang penengah dan mudah mudahan bisa didamaikan dengan asas musyawarah dan mufakat untuk penyelesaiannya dan tidak terbawa ke permasalahan hukum, melaikan kejahatan kriminal seperti pembunuhan itu sudah menjdi tugas penegak hukum untuk menyelesaikannya dan masalah seperti tindak kriminal tidak adalagi urusannya kepada desa langsung penegak hukum yang turun untuk memproses permasalahan tersebut. Berdasarkan wawancara masarakat desa seharusnya bidang

kemasyarakatan desa melakukan tindakan tindakan positif terhadap warga dalam perminggunya.¹⁶

8. Bidang Pemerintahan

Hasil wawancara dengan KU Pemerintahan Desa Huraba I, bahwa Dalam bidang pemerintahan desa, petugas membuat musyawarah dan dan merencanakan program program yang intinya mendukung dan mendapatkan kesejahteraan masarakat ,dan mebuat pelatihan adat istiadat untuk meningkatkan pengetahuan masarakat dalam adat budaya mandailing natal dan pembangunan pembangunan paret beton jalan dan sebagainya.¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara masyarakat bahwa bidang pemerintahan seharusnya memberikan penyuluhan penyuluhan untuk kepentingan masarakat seperti penyuluhan anti narkoba dan perbuatan yang melarang uu dan seperti mencuri di khususnya di arae persawahan tetapi aparat desa tidak melakukan itu mereka hanya mementingkan urusan perkantoran kepala desa saja.

Hasil wawancara dengan KU Pemerintahan Desa Huraba II, bahwa Untuk mengesahkan data, data yang akan disahkan disinkron untuk penomoran rumah masyarakat. Setelah dibuat penomoran rumah semua data masyarakat terbaca dari peta desa dan di ketahui berapa orang yang ada di dalam kk di rumah tangga tersebut. Jadi jelas terlihat dari komputer melalui peta desa tersebut dan yang telah terbentuk

¹⁶Amir Husin, KU Kemasyarakatan Desa Huraba II, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba II

¹⁷Khairil Anwar, KU Pemenrintahan Desa Huraba I, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba II

baru tiga lorong desa dan sekitar empat lorong lagi masih mau menyusul masih dalam pembuatan peta desa.¹⁸

B. Hambatan yang menjadi penyebab tidak tercapainya program kegiatan Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat menurut fiqh siyasah di Kecamatan Siabu Mandailing Natal

Dalam penelitian ini peneliti melihat beberapa masalah ataupun hambatan tercapainya kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut.

1. Bidang Keamanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Fahrur Rozi, warga Desa Huraba I, bahwa Salah satu masalah yang muncul dalam desa ini yaitu dalam pengamanan Desa. Di Desa ini telah didirikan poskamling, namun saat ini sudah tidak terlalu difungsikan, karena para warga ataupun NNB desa merasa malas untuk melakukan ronda. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya dana operasional dalam keamanan desa. Kepala Desa kurang memerhatikan dana operasional untuk jaga malam. NNB merasa sebaiknya Kepala Desa memberikan biaya operasional seperti makanan atau minuman untuk jaga malam, sehingga NNB malam untuk melakukan ronda.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Huraba I, bahwa kendala yang terjadi dalam pemerintah desa yaitu masih banyak muda mudi yang menyalah gunakan narkoba dan perjudian, begitu juga masalah keamanan Desa Huraba I, didirikan poskamling

¹⁸Rajab Efendi, KU Pemenintahan Desa Huraba II, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba II

¹⁹Fahrur Rozy, warga Desa Huraba I, *Wawancara*, 1 Oktober 2019 di Desa Huraba II

tetapi tidak ada manfaatnya hanya sekedar formalitas saja. Selain itu mengenai kebersihan yaitu susah mengajak warga untuk bergotong royong.²⁰

Hasil wawancara dengan Sekda Desa Huraba II, bahwa Kendala yang terjadi dalam urusan pemerintahan berupa keamanan, misalnya dalam keamanan desa telah didirikan poskamling tetapi tidak ada penggunaannya hanya formalitas saja di desa tersebut. Selain itu ada kebijakan desa dan kapolsek untuk mendirikan polmas atau polisi masyarakat untuk menjaga keamanan desa tetapi sampai sekarang tidak pernah terjadi dan hanya sebuah program tulisan saja tidak ada tindak lanjutnya.²¹

2. Bidang Pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Paun, warga Desa Huraba II, bahwa Hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu, kurangnya keterbukaan pemerintahan Desa dalam publikasi pengelolaan anggaran dana Desa dan masih kurangnya pembangunan di Desa. Kurangnya penertiban admin dalam penyusunan perangkat desa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintahan pasal 24 ayat 6 yang menyebutkan bahwa pengurus ataupun perangkat Desa diharuskan bedomisili di desa tersebut minimal 1 tahun.²²

²⁰Dorlan, Sekretaris Desa Huraba I, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba I

²¹Sam'an Hasibuan, Sekda Desa Huraba II, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba

²²Paun, warga Desa Huraba II, *Wawancara*, 1 Oktober 2019 di Desa Huraba II

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bonan Dolok, bahwa Hambatan yang terjadi yaitu kadang masyarakat tidak mau memberikan lahannya untuk dibuat jalan. Saat ini sulit untuk mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong.²³

Hasil wawancara dengan KU Pemerintahan Desa Huraba I, bahwa Kendala yang terjadi dalam pemerintahan kurangnya sumber daya manusia dalam penilaian pelaksanaan pembangunan dan kurang paham tata cara pengelolaan kegiatan di desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah musyawarah di desa.²⁴

Hasil wawancara dengan KU Pemerintahan Desa Bonandolok, bahwa salah satu masalah yang terjadi yaitu yang perternakan kambing masyarakat tidak kondusif. Dalam beternakan kambing masyarakat menjual sebagian kambing-kambing tersebut sehingga tidak berkembang karena kambingnya habis di jual, padahal kambing tersebut di danai desa.²⁵

3. Bidang Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bonan Dolok, bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal gotong royong. Masih ada pihak-pihak masyarakat yang pro dan kontra pada Kepala

²³Sapril Mansur, Kepala Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 30 September 2019 di Desa Bonan Dolok

²⁴Khairil Anwar, KU Pemenintahan Desa Huraba I, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba II

²⁵Abdul Hadi, KU Pemerintahan Desa Bonan Dolok, *wawancara*, 10 Oktober 2019 di Desa Bonan Dolok

Desa. Tetapi wawancara dari masyarakat tidak ada gerakan untuk bergotongroyong dari aparat desa²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Huraba I, bahwa Hambatan yang muncul yaitu sumber daya manusianya. Karena yang kita ketahui bagaimana masyarakat di kampung banyak yang belum memahami program-program kerja Desa yang telah direncanakan. Masih banyak membutuhkan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat lebih memahami bagaimana tujuan program kerja Desa agar Desa kita ini lebih maju.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Huraba II, bahwa Yang menjadi hambatan dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat yaitu pemikiran masyarakat. Saat ini karena banyaknya bantuan dari Desa, jadi masyarakat lebih berharap untuk selalu dibantu. Kebanyakan masyarakat berfikir bahwa semakin banyak bantu Desa semakin sukses pemerintahan Kepala Desa. Namun kenyataannya bukanlah seperti itu, yang benar adalah semakin mandiri masyarakatnya maka itulah yang dikatakan pemerintahan Desa yang berhasil. Jadi yang menjadi hambatannya yaitu merubah pemikiran masyarakat agar menjadi lebih mandiri. Selain itu hambatannya yaitu minimnya rasa gotong royong di Desa ini.²⁸

²⁶Ucok, warga Desa Bonan Dolok, *wawancara*, 27 September 2019 di Desa Bonan Dolok

²⁷Domroh Parinduri, Kepala Desa Huraba I, *wawancara*, 29 September 2019 di Desa Hurab I

²⁸Kasmir Dalimunthe, Kepala Desa Huraba II, *Wawancara*, 28 September 2019 di Desa Huraba II

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Hasil wawancara dengan KU Pemberdayaan Desa Huraba I, bahwa Permasalahan yang terdapat dalam pemberdayaan yaitu dalam pendataan masih banyak yang tidak ikut dalam bantuan dana desa bagi yang kurang mampu. Selain itu ada beberapa warga yang seharusnya tidak lagi mendapatkan bantuan desa lagi, tetapi dia masih mendapatkannya, padahal masih banyak yang lebih layak untuk mendapatkannya bantuan desa karna kebiasaan bantuan desa seperti raskin hanya di patokan berapa orang yang mendapatkannya dan yang hanya di data.²⁹

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, bahwa Di desa huraba juga masih banyak anak muda dan orang tua yang mengkonsumsi narkoba dan bermain judi di warung, namun telah ada kebijakan pemerintah desa menyelenggarakan penyuluhan agar masyarakat desa tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan bermain judi, tetapi masyarakat masih saja mengkonsumsi narkoba dan masih banyak perjudian di warung warga.³⁰

5. Bidang Pembangunan

Hasil wawancara dengan KU Pembangunan Desa Huraba I, bahwa Kendala yang terjadi dalam pembangunan pekerja menginginkan gaji yang lebih banyak padahal pekerja tersebut bermalas malas untuk

²⁹Abdur Rahman, KU Pemberdayaan Desa Huraba I, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba

³⁰Sam'an Hasibuan, Sekda Desa Huraba II, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba II

bekerja. Selain pembebasan lahan masyarakat agak sulit memberi lahannya untuk dibuat pembangunan desa padahal pembangunan tersebut untuk menyamakan dan memberikan fasilitas warga desa.³¹

Hasil wawancara dengan KU Pembangunan Desa Huraba II, bahwa Kendala dalam pembangunan terdapat pada pola pikir masyarakat bahwasanya masyarakat tidak sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan padahal apabila masyarakat memberi sebagian tanahnya bisa memperuntungkan kepada dirinya sendiri. Misalnya apabila ingin menjual tanah tersebut maka harga tana bisa dua kali lebih besar dari pada harga sebelumnya karna tanah tersebut sudah berada di tepi jalan.³²

Hasil wawancara dengan KU Pembangunan Bonandolok, bahwa Pembangunan di Desa Bonandolok semuanya sudah terbangun seperti yang di musyawarahkan aparat desa. Misalnya pembangunan jalan di permukiman warga dan pembangunan di area persawahan dan di area pekebunan. Namun, terjadi kendala yang terjadi yaitu pemerintah desa hanya memperkerjakan pembangunan pada orang-orang yang dekat saja pada mereka, padahal masih banyak masyarakat yang berprofesi dalam pembangunan di Desa Bonandolok atau pun bisa membangun tapi pengangguran. Seharusnya permintaan masyarakat dalam pembangunan tersebut masyarakat ikut dalam pembangunan agar

³¹Pangeran Rambe, KU Pembangunan Desa Huraba I, *wawancara*, 7 Oktober 2019 di Desa Huraba I

³²Salwan Pulungan, KU Pembangunan Desa Huraba II, *wawancara*, 8 Oktober 2019 di Desa Huraba II

masyarakat yang pengangguran mendapatkan pekerjaan dan bergaji sesuai dengan kinerjanya dan menurut masyarakat itu adalah salah satu sebagai ke sejahteraan kepada masarakat bonandolok.³³

C. Pimpinan Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat menurut Fiqh Siyasah di kecamatan Siabu

Seorang pemimpin hendaknya bersikap adil dalam memakmurkan masyarakatnya. Adil dalam hal ini yaitu bersikap seimbang dalam mensejahterakan masyarakat, tidak pilih-pilih ataupun tidak memandang strata sosial masyarakatnya. Jika seorang Kepala Desa dapat berlaku adil maka akan sejahteralah kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Paun, warga Desa Huraba II, bahwa Dalam menjaga keamanan Desa, Kepala Desa bekerjasama dengan masyarakatnya. Salah satunya dibidang keamanan, Kepala Desa kurang memberikan amanah kepada warganya untuk keamanan yang dikelola oleh NNB. karena masyarakat Desa tersebut menganggap anak-anak muda (NNB) lebih mampu mengendalikan dan menjaga keamanan Desa. Masyarakat Desa tersebut biasanya menyebut NNB sebagai *Pagar ni Huta*". Selain itu Kepala Desa juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong seluruh masyarakat Desa Huraba II tanpa pandang bulu dalam hal kebersihan. Namun masih ada kekurangan dalam kebersihan di desa misalnya kekurangan alat-alat kebersihan dan

³³Suhaedi, KU Pembangunan Desa Bonandolok, *wawancara*, 10 Oktober 2019 di Desa Bonandolok

kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Putri, warga Desa Huraba II, bahwa Tindakan Kepala Desa yang telah dilakukan dalam kesejahteraan masyarakat yaitu dibidang pembangunan seperti pembangunan jalan pemukiman kampung, pembangunan jalan ke sawah masyarakat dan dibuatnya parit-parit sawah sehingga air tidak meluap ke area persawahan warga. Akan tetapi pemenggunaan parit sawa belum merata sehingga saat musim hujan masih ada arae persawahan masarakat yang ter benam. Selain itu dilakukan juga pembangunan Masjid dan Kepala Desa juga mengajak masyarakatnya untuk bergotong royong dalam penjagaan air yang berfungsi sebagai kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga air tetap terjaga bersih.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara saritem, warga Desa Bonan Dolok, bahwa Memberikan fasilitas terutama dibidang pertanian, pembukaan lahan dan mempermudah masyarakat untuk mengelola persawahan masing-masing masyarakat Desa Bonan Dolok. Namun masih ada masyarakat yang belum memperoleh fasilitas alat-alat pertanian.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Huraba I, bahwa Yang dilakukan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur pertama kita melakukan musyawarah Desa untuk menyusun program-program apa saja yang kita butuhkan untuk kemajuan Desa ini.

³⁴Paun, warga Desa Huraba II, *Wawancara*, 1 Oktober 2019 di Desa Huraba II

³⁵Putri, warga Desa Huraba II, *Wawancara*, 1 Oktober 2019 di Desa Huraba II

³⁶Ucok, warga Desa Bonan Dolok, *wawancara*, 27 September 2019 di Desa Bonan Dolok

Selain itu kita bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat baik itu Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan NNB kita berdayakan seluruhnya agar Desa kita menjadi Desa yang adil dan makmur. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan yang terbaik untuk Desa kita ini. Namun masih ada program-program desa yang belum terlaksana dengan maksimal³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Huraba II, bahwa Sebenarnya yang diharapkan dari masyarakat yaitu menggalakkan pertanian. Di Desa ini juga kita telah menerima subsidi pupuk, namun ada kendala. Telah dimusyawarahkan untuk mengurangi masalah maka akan diperbaiki kembali struktur organisasi pemerintahan dibidang pertanian. Sehingga penyebaran pupuk dapat dilakukan secara merata.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bonan Dolok, bahwa Program kerja yang sudah disusun yaitu peningkatan pembukaan lahan di Rodang, memperluas area untuk tanaman padi, dan peningkatan akses jalan ke area sawah agar mudah mengangkat hasil pertanian.³⁹

Hasil wawancara dengan Kepala Pemerintahan Desa Bonan Dolok, bahwa Penyalahgunaan narkoba masih banyak terdapat di desa Bonan Dolok, begitu juga mengenai keamanan desa. Masih kurang penjagaan keamanan hal ini dilihat dari banyaknya warga desa bonandolok kemalingan baik di

³⁷Domroh Parinduri, Kepala Desa Huraba I, *wawancara*, 29 September 2019 di Desa Hurab I

³⁸Kasmir Dalimunthe, Kepala Desa Huraba II, *Wawancara*, 28 September 2019 di Desa Huraba II

³⁹Sapril Mansur, Kepala Desa Bonan Dolok, *wawancara*, 30 September 2019 di Desa Bonan Dolok

rumah, di sawah, maupun di perkebunan. Dalam mengantisipasi penyebaran narkoba Kepala Desa telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba. Namun, sebagian masyarakat tidak begitu antusias. Dan mengenai kebersihan nmb masih terus berpartisipasi dalam bidang kebersihan umumnya di area permakaman atau tanah wakaf.⁴⁰

D. Analisa Peneliti

Dalam hal pembangunan salah satu yang tidak sesuai yaitu Kepala Desa lebih memilih pekerja bangunannya berasal dari kerabat dekat Kepala Desa, sementara di Desa tersebut masih banyak masyarakat yang pengangguran namun memahami hal pembangunan. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan mensejahterakan masyarakat karena melalui pengerjaan pembangunan tersebut warga memperoleh imbalan dan merupakan sebagai pemasukan bagi diri dan keluarga. Dari masalah tersebut dapat dilihat bahwa kepala Desa tidak adil.⁴¹

Ditip desa yang ada di Kecamatan siabu, tepatnya di desa Huraba I, Huraba II, dan desa bonandolok telah didirikan pos kamling tetapi kurang di fungsikan. Sementara di desa dibutuhkan penjagaan untuk keamanan desa. Hal ini dapat di lihat kurang profesional kepala desa dalam membagi tugas untuk menjaga keamanan desa sementara di desa huraba I, Huraba II dan Bonandolok sering terjadi kehilangan barang barang, tanaman tanaman dan ternak warga. Seharusnya kepala desa lebih

⁴⁰ Abdul Hadi, KU Pemerintahan Desa Bonan Dolok, *wawancara*, 10 Oktober 2019 di Desa Bonan Dolok

⁴¹ Hasil Observasi peneliti Oktober 2019

bijak dalam mengatur keaman desa dengan mengadakan ronda dan membagi sif untuk menjaga keamanan desa. Seorang kepala desa hendaknya memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan yang akan di lakukan atau harus memiliki sifat *kafaa'ah*. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-bayyinah: 7:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk.*

Dalam penggunaan anggaran bantuan dana desa, Kepala Desa kurang efektif dalam mendata warganya yang kurang mampu, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pendataan warga yang kurang mampu. Kesalahan tersebut antara lain ketidaksesuaian pembagian bantuan, seharusnya warga desa itu tidak layak untuk mendapatkan bantuan dana desa menjadi mendapatkan bantuan, dan yang seharusnya mendapatkan bantuan dana desa tidak mendapatkan bantuan dana desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan Kepala Desa dalam mengawasi pendataan warga yang berhak mendapatkan bantuan, sehingga tidak tercapainya profesionalisme Kepala Desa dalam kesejahteraan masyarakat dan kurang amanah. Allah Swt berfirman dalam Q.S An-nisa: 58

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan*

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Selain itu dalam pengaturan aparat desa, kepala desa juga kurang profesional. Karena Kepala Desa mengangkat aparat desanya yang tidak berdomisili satu tahun di desa tersebut, sementara dalam peraturan pengangkatan aparat desa seharusnya berdomisili selama dua tahun di desa tersebut. Hal ini bertujuan agar aparat Desa lebih memahami bagaimana kondisi keadaan Desa. Seorang kepala Desa harus memiliki Etos kerja yang tinggi, sehingga aparat Desa lebih semangat dan dapat bekerjasama dengan masyarakat. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Qashas: 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Dari analisis diatas peneliti melihat bahwa Kepala Desa masih kurang profesional dalam menyejahterakan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena kurang bijaksananya Kepala Desa dalam melakukan tugasnya. Alasan lainnya yaitu kurangnya kerjasama antara warga dan Kepala Desa serta pendidikan Kepala Desa yang masih kurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis berkesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Program kerja Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu Kepala Desa memberikan sarana dan prasarana dalam bidang usaha masyarakat. Kepala Desa memfokuskan pada bidang pertanian seperti memberikan perlengkapan pertanian, memberi akses jalan menuju sawah-sawah masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengangkat hasil tani. Namun sarana prasarana bidang usaha masyarakat belum sepenuhnya di dapatkan masyarakat seperti peralatan tani dan obat-obatan pertanian, selain itu masyarakat juga belum merasakan keamanan desa.
2. Hambatan yang terdapat dalam tiap-tiap desa yaitu:
 - a. Bidang keamanan, kurangnya dana operasional dalam keaman desa dan kurangnya pemungisian pos kamling.
 - b. Bidang pemerintahan, kurangnya penertiban dalam penyusunan perangkat desa, kurangnya sumber daya manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, seperti berternak.
 - c. Bidang kemasyarakatan kurangnya penyuluhan-penyuluhan tujuan perogram desa agar desa lebih maju

- d. Bidang pembangunan, kurangnya kebijakan kepala desa dalam memanfaatkan SDM yang ada di desa
3. Pimpinan kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat yaitu mengendalikan dan menjaga keamanan desa, mengajak masyarakat bergotong royong, memberi kemudahan masyarakat untuk mengelola sawah agar lebih baik. Namun dalam hal pembangunan kepala desa lebih mengutamakan krabat dekat dari pada warga yang membutuhkan pekerjaan pembangunan tersebut. Selain itu dalam bidang keamanan Kepala Desa telah membuat program untuk keamanan namun belum maksimal hasilnya karena didirikan poskamling namun tidak difungsikan. Masih ada kekurangan dalam kebersihan di desa misalnya kekurangan alat-alat kebersihan dan kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

B. Saran-saran

Adapun sumbangan saran-saran yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat lebih meningkatkan kerjasama demi kemajuan Desa
2. Kepala Desa hendaknya lebih transparan dalam hal dana Desa, dan lebih kreatif lagi mengajak masyarakat untuk bekerjasama demi kemajuan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

3. Hendaknya PPL di Kecamatan Siabu lebih sering memberikan penyuluhan bagi masyarakat, agar masyarakat lebih memahami bagaimana kehidupan masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sopandi, Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bekasi, *Jurnal Kybernan*, Vol. 1, No. 1 Maret 2010
- Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Meliter* Jakarta: Amzah, 2006
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*, 2015
- Bimer Ambarita, "Profesionalisme, Esensi Kepemimpinan, Dan Manajemen Organisasi", *Jurnal Unimed*, Vol 6. No 2, September 2013
- Burhanuddin, dkk, *Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh Kabupaten Aceh Barat* Vol.4, No.1, Februari 2016
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: AUP, 2001
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 19, No 2, November 2015
- Heri Kusmanto, Dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan* Medan: Bitra Indonesia, 2007
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1993
- I Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Kartini Kartono, *Peminpin Dan Kepemimpinan-Apakan Pemimpin Abnormal Itu?*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998

- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: 1993
- M. Nasir Budiman, Alwahidi Ilyas, *Kepemimpinan Dalam Islam (Suatu Tinjauan Normatif)*, Medan: Nadiya Foundation, 2003
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Mumtaz Ahmad, *Hak Melindungi Undang-Undang*, Jakarta: Anggota Ikapi, 1996
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Melisa Rosali Tumangkeng, *Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa*
- Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, Malang: UIN Maliki Pers, 2009
- Nurul hidayah, "Kesiapan Psikologis Masyarakat Pedesaan Dan Perkotaan Menghadapi Diversifikasi Pangan Pokok", *Jurnal Humanitas*, Vol. VIII, No.1 Januari 2011
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005, Tentang Desa Pasal 1 ayat 5 dan 6
- Peraturan pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005, Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 dan 2
- Prajudi Atmosudirjo, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, Jakarta: 1976
- Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islma*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016
- Sudarwan Danim, *Profesionalisme dan Etika Profesi Guru* Bandung: Alfabeta, 2013

Suyanto dan Bambang Pudjiyanto, Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Sejahtera (Studi Kasus di Kabupaten Sragen), *Jurnal Kementerian Sosial*, Vol. 5, No. 01, September - Desember, Tahun 2015

Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern* Jakarta: Kencana, 2010

Sarlito W. Sarwono, dkk, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2014

BIODATA

Nama : Anugrah Al-Basyir Lubis
NIM : 15 103 00050
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinang Sori/ 15 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
Nama Ayah : Pangeran Rao Lubis
Nama Ibu : Siti Asyurah Hasibuan

Pendidikan :

- a. SD Negeri Inpres Huraba Tahun 2003-2009
- b. MTs S Darul Ikhlas Dalan Lidang Tahun 2009-2012
- c. MAN Siabu Tahun 2012-2015
- d. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2015-2019

Wawancara dengan Kepala Desa Huraba II



Wawancara dengan Kepala Desa Bonan Dolok



Wawancara dengan Kepala Desa Huraba I



Wawancara dengan KU Pembangunan Huraba I



Wawancara dengan Sekda Huraba I



Wawancara dengan KU Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Huraba I



Wawancara dengan Bendahara Huraba I



Wawancara Sekdes Huraba II



Wawancara dengan Sekdes Bonan Dolok



Wawancara deanga KU Pemerintahan Huraba I



Wawancara dengan Ketua NNB Huraba I dan II





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan, 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B994/In.14/D.6/PP.00.9/07/2019

15 Juli 2019

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth, Bapak/Ibu

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Hasiyah, M.Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

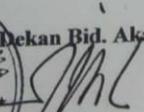
Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Anugrah Al-Basyir Lubis
Nim : 15 103 00050
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Propesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Tinjau Dari Karakteristik Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyash Di Kecamatan Siabu Mandailing Natal**

Seiring dengan hal tersebut kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

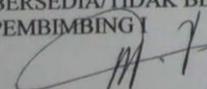
An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Khwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

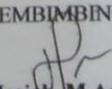

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan, 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : Bgg 4/In.14/D.6/PP.00.9/07/2019

Lamp : -

15 Juli 2019

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth, Bapak/Ibu

1. **Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**
2. **Hasiah, M.Ag**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

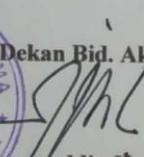
Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Anugrah Al-Basyir Lubis
Nim : 15 103 00050
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Propesionalisme Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Tinjau Dari Karakteristik Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyash Di Kecamatan Siabu Mandailing Natal**

Seiring dengan hal tersebut kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

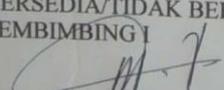
An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

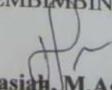
Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

